



Komunikasi Kebijakan Publik Pemerintah dalam Mengumumkan Kenaikan Gaji Guru ASN dan Non ASN 2025

Nurul Baridah Fauzi^{1*}, Mayra Khalidazia Ahyar², Khairatun Hisan³, Sayyidatina Vista Kintani⁴, Nabila Nursabrina Daud⁵, Winda Dwi Astuti Zebua⁶

¹⁻⁶ Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi : mayrakhalidaziaa@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the government's communication strategy in communicating the salary increase policy for State Civil Apparatus (ASN) and non-ASN teachers in 2025. The study used a qualitative approach using a literature review method, examining various official government sources, policy reports, and relevant scientific publications. The analysis focused on three main aspects of the communication strategy: information transmission, message clarity, and consistency of communication between institutions. The results show that the government has utilized various communication channels, both conventional and digital, to disseminate the policy to the public. However, several obstacles remain, such as limited access to information in remote areas, the emergence of misinformation on social media, and suboptimal communication coordination between relevant institutions. On the other hand, the development of digital technology and the increasing transparency of public information provide significant opportunities to strengthen the effectiveness of policy communication. A more integrated, clear, and inclusive communication strategy is considered crucial for increasing public understanding and support for the teacher salary increase policy. This policy is expected to not only improve teacher welfare but also contribute to the sustainable improvement of the quality of national education.*

Keywords: *Communication Strategy; National Education; Public Policy; Teacher Salary Increase; Teacher Welfare*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan kenaikan gaji bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber resmi pemerintah, laporan kebijakan, serta publikasi ilmiah yang relevan. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama strategi komunikasi, yaitu transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi komunikasi antar lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memanfaatkan beragam saluran komunikasi, baik media konvensional maupun digital, untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada publik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan akses informasi di wilayah terpencil, munculnya misinformasi di media sosial, serta kurang optimalnya koordinasi komunikasi antarinstansi terkait. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan meningkatnya transparansi informasi publik memberikan peluang besar untuk memperkuat efektivitas komunikasi kebijakan. Strategi komunikasi yang lebih terintegrasi, jelas, dan inklusif dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan gaji guru. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Publik; Kenaikan Gaji Guru; Kesejahteraan Guru; Pendidikan Nasional; Strategi Komunikasi

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia telah lama menjadi isu yang krusial dalam sektor pendidikan. Guru, baik yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun Non-ASN, sering kali menghadapi tantangan terkait penggajian yang dianggap belum mencerminkan beban kerja dan tanggung jawab mereka. Hal ini menjadi sorotan karena kesejahteraan guru memiliki hubungan langsung dengan kualitas pendidikan yang diberikan

kepada peserta didik. Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan gaji guru pada tahun 2025 muncul sebagai respons pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup tenaga pendidik sekaligus memperkuat kualitas sistem pendidikan nasional.

Data jumlah guru berstatus ASN dan Non-ASN pada tahun 2023 menurut Persatuan Guru Republik Indonesia yang dilansir dari Kompas.id (18/11/2024) diketahui jumlah guru berstatus ASN adalah sebanyak 1.256.570 orang atau sebesar 36,81%. Kemudian guru berstatus PPK adalah sejumlah 770.134 orang atau sebesar 22,56%; guru swasta sebanyak 902.531 orang atau 26,44%; dan guru honorer adalah sejumlah 484.483 orang atau sebesar 14,19%. Grafik jumlah guru dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini.



Gambar 1. Data Jumlah Guru ASN dan Non ASN (2023)

Sumber: Data PGRI Indonesia (2023) yang dilansir dari Kompas.id (18/11/2024)

Dilansir dari antarnews.com, artikel ini juga membahas sejumlah tantangan pendidikan di Indonesia. Pertama, seringnya pergantian kurikulum menimbulkan kebingungan bagi guru dan siswa, serta berpotensi menurunkan standar pendidikan. Kedua, guru dibebani dengan administrasi yang berlebihan sehingga kualitas pengajaran menurun. Ketiga, kebijakan pendidikan yang tidak konsisten menyebabkan dampak jangka panjang terhadap siswa dan kualitas generasi muda. Selain itu, meskipun kesejahteraan guru ditingkatkan, perhatian terhadap kesejahteraan siswa dinilai belum maksimal. Permasalahan ini mencerminkan tantangan besar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dilansir dari artikrl cnnindonesia.com (2024), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru ASN sebesar satu kali gaji pokok dan peningkatan tunjangan profesi guru non-ASN menjadi Rp2 juta per bulan mulai 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan mendukung pendidikan berkualitas. Anggaran kesejahteraan guru diproyeksikan naik menjadi Rp81,6 triliun, meningkat Rp16,7 triliun dari tahun sebelumnya. Namun, pengumuman kebijakan strategis seperti ini sering kali menimbulkan berbagai dinamika di tengah masyarakat. Ketidakpahaman atau miskomunikasi terkait kebijakan dapat memicu resistensi, kritik, atau bahkan

ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penyampaian kebijakan oleh Pemerintah menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan kebijakan ini diterima dan dipahami secara luas oleh para pemangku kepentingan, termasuk guru, organisasi profesi, dan masyarakat umum.

Data gaji guru PNS setiap golongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil adalah seperti pada Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Gaji Guru PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

	A	B	C	D	E
Golongan 1	Rp1.685.700- Rp 2.522.600	Rp 1.840.800- Rp 2.670.700	Rp 1.918.700- Rp 2.783.700	Rp 1.999.900- Rp 2.901.400	
Golongan 2	Rp 2.184.000- Rp 3.643.400	Rp 2.385.000- Rp 3.797.500	Rp 2.485.900- Rp 3.958.200	Rp 2.591.100- Rp 4.125.600	
Golongan 3	Rp 2.785.700- Rp 4.575.200	Rp 2.903.600- Rp 4.768.800	Rp 3.026.400- Rp 4.970.500	Rp 3.154.400- Rp 5.180.700	
Golongan 4	Rp 3.287.800- Rp 5.399.900	Rp 3.426.900- Rp 5.628.300	Rp 3.571.900- Rp 5.866.400	Rp 3.723.000- Rp 6.114.500	Rp 3.880.400- Rp 6.373.200

Sementara guru berstatus Non-PNS, gaji yang diperoleh adalah pada rentang Rp1.500.000 – Rp2.000.000. Namun data ini belum dapat dipastikan karena pada kenyataannya gaji guru berstatus Non-PNS bisa lebih rendah dari rentang tersebut, tergantung kebijakan instansi.

Untuk itu kita memerlukan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan kebijakan strategis, terutama dalam konteks kebijakan publik yang kompleks. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menyampaikan maksud, tujuan, dan manfaat dari kebijakan kepada masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah komunikasi kebijakan publik. Komunikasi publik merupakan strategi untuk mengkomunikasikan informasi secara sistematis dan terarah kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Tujuan utama dari komunikasi publik adalah untuk memberikan informasi yang jelas, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tertentu, serta memengaruhi sikap atau perilaku mereka agar selaras dengan tujuan kebijakan yang dirumuskan. Dengan penerapan strategi komunikasi yang tepat, kebijakan yang disampaikan tidak hanya lebih mudah diterima oleh masyarakat, tetapi juga dapat memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan (Hasibuan et al., 2020).

Dalam praktiknya, komunikasi publik juga dipahami sebagai proses menciptakan kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan melalui penggunaan pesan yang efektif. Proses ini melibatkan berbagai elemen, seperti pemilihan kata, media komunikasi yang digunakan, hingga waktu penyampaian yang tepat. Tujuan utama dari komunikasi ini adalah

memastikan bahwa audiens dapat memahami pesan yang disampaikan dengan jelas dan benar. Dalam konteks public speaking, misalnya, komunikasi publik memiliki dua fungsi utama: informatif dan persuasif. Fungsi informatif bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada audiens, sementara fungsi persuasif bertujuan untuk memengaruhi pandangan atau tindakan audiens agar sejalan dengan tujuan kebijakan. Dengan komunikasi yang efektif, audiens tidak hanya akan memahami kebijakan secara lebih mendalam tetapi juga mampu memberikan umpan balik yang konstruktif dan relevan (Lestari et al., 2024).

Dalam kebijakan publik, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas komunikasi antar pihak yang terlibat. Proses implementasi kebijakan melibatkan banyak faktor, seperti sumber daya manusia dan material, koordinasi antar lembaga, serta karakteristik pelaksana kebijakan. Komunikasi yang baik di antara semua pihak terkait menjadi penghubung utama untuk memastikan setiap elemen tersebut dapat bekerja secara sinergis. Selain itu, komunikasi yang jelas dan terarah membantu mengurangi potensi miskomunikasi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Misalnya, dalam kampanye penurunan prevalensi stunting, strategi komunikasi yang terarah diperlukan untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada masyarakat, termasuk dalam memilih media komunikasi yang sesuai dengan karakteristik audiens (Maciej Serda et al., 2022).

Lebih jauh lagi, komunikasi yang efektif tidak hanya penting dalam lingkup kebijakan besar, tetapi juga relevan dalam konteks yang lebih spesifik, seperti pembelajaran public speaking. Public speaking adalah salah satu cara komunikasi publik yang sangat bermanfaat untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada audiens. Dalam situasi ini, keberhasilan komunikasi diukur dari sejauh mana audiens dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik dan mampu meresponsnya secara positif. Misalnya, program pelatihan public speaking di sekolah-sekolah dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa sekaligus membangun rasa percaya diri mereka dalam berbicara di depan umum (Maslamah, 2023). Selain itu, sistem informasi publik yang berbasis teknologi, seperti Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), juga membutuhkan komunikasi yang efektif dan inovatif. Dalam penerapan SPBE, komunikasi memainkan peran penting untuk menjembatani antara kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dan pemahaman masyarakat terhadap manfaatnya. Komunikasi yang jelas, terstruktur, dan konsisten akan memastikan semua pihak yang terlibat dapat memahami kebijakan dengan baik, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, inovasi seperti SPBE dapat diimplementasikan secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan publik (Tunggala & Sinta, 2024).

Berdasarkan teori di atas, komunikasi kebijakan publik menjadi elemen krusial dalam menyampaikan kebijakan yang bersifat strategis. Dalam konteks penelitian ini, teori komunikasi kebijakan publik bertujuan untuk melihat sejauh mana strategi komunikasi yang diterapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas, meningkatkan kepedulian, serta mempengaruhi penerimaan kebijakan oleh khalayak sasaran.

Dalam konteks ini, pemerintah telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan gaji guru, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, dengan tambahan tunjangan profesi yang signifikan. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para pendidik, yang diharapkan dapat berdampak positif pada kualitas pendidikan di tanah air. Dalam kerangka teori komunikasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakannya, tetapi juga pada cara kebijakan tersebut disampaikan. Komunikasi yang jelas, berbasis fakta, dan menggunakan saluran yang tepat dapat membantu membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi kebijakan tersebut. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan persepsi negatif yang berujung pada hambatan dalam implementasi.

pemerintah adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ini sejalan dengan gagasan Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2005), yang mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Disimpulkan bahwa komunikasi berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan sosial, koordinasi, dan penyampaian informasi, sehingga membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks kebijakan publik, komunikasi menjadi faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Para pembuat kebijakan harus memahami dan menyampaikan pesan, program, serta gagasan pemerintah kepada masyarakat agar tujuan kebijakan negara dapat tercapai.

George C. Edward mengatakan bahwa keberhasilan variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat diukur dengan tiga cara. Pertama, transmisi komunikasi yang efektif akan memungkinkan implementasi yang efektif. Kedua, kejelasan informasi-informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau menimbulkan multitafsir. Ketiga, konsistensi informasi perintah atau informasi yang disampaikan harus konsisten dan jelas. (Zoraya & Ridwan, 2021).

Pengumuman kebijakan kenaikan gaji guru ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan terhadap sektor pendidikan, yang sering menjadi perhatian masyarakat luas. Kebijakan ini juga menjadi alat strategis untuk membangun kepercayaan

publik, terutama di kalangan komunitas pendidik, bahwa pemerintah serius dalam mendukung kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan publik yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan pesan dari pemerintah dapat dipahami dengan jelas oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru ASN, Non ASN, masyarakat umum, dan lembaga pendidikan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan strategi komunikasi yang digunakan pemerintah dalam mengumumkan kenaikan gaji guru ASN dan Non ASN pada tahun 2025. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis efektivitas komunikasi tersebut apakah berhasil menjawab harapan masyarakat serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam proses komunikasi kebijakan publik ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan deskriptif yang cenderung menggunakan analisis (Mappasere & Suyuti, 2019). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur akan digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang komunikasi kebijakan publik terkait kenaikan gaji guru. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data penelitian yang diperoleh melalui berbagai sumber dokumen dan referensi yang kredibel, termasuk website resmi pemerintah, portal berita nasional terpercaya, jurnal akademik, buku, artikel online, dan dokumen resmi peraturan perundang-undangan akan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan secara komprehensif. Peneliti akan melakukan penelaahan sistematis terhadap dokumen-dokumen resmi, artikel, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan langsung dengan kebijakan kenaikan gaji guru. Proses pengumpulan data akan difokuskan pada mengidentifikasi informasi yang relevan, menganalisis konten dari sumber-sumber yang dikumpulkan, dan menginterpretasikan informasi untuk memahami proses komunikasi kebijakan publik yang dilakukan oleh Presiden dalam mengumumkan kenaikan gaji guru ASN dan Non ASN. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas komunikasi kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan strategi komunikasi yang digunakan pemerintah dalam mengumumkan kenaikan gaji guru ASN dan Non ASN pada tahun 2025. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis efektivitas komunikasi tersebut apakah berhasil menjawab harapan masyarakat serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam proses komunikasi kebijakan publik ini. Teori komunikasi dalam implementasi kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh George C. Edwards, menekankan pentingnya tiga aspek utama dalam transmisi komunikasi: efektivitas transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi pesan. Berikut adalah analisis strategi komunikasi pemerintah dalam mengumumkan kebijakan kenaikan gaji guru ASN dan Non ASN pada tahun 2025.

Transmisi Komunikasi

Transmisi komunikasi menurut George C. Edwards merupakan proses penyampaian informasi yang efektif dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan penerima kebijakan. Dalam kebijakan kenaikan gaji guru ASN dan Non ASN tahun 2025, kecepatan, akurasi, dan cakupan informasi sangat penting. Pemerintah memanfaatkan saluran digital, media konvensional, dan pertemuan langsung untuk mempercepat penyebaran informasi, namun di daerah terpencil masih terdapat kendala infrastruktur yang menghambat akses informasi. Meskipun informasi disampaikan dengan baik melalui media sosial dan portal berita, beberapa wilayah dengan keterbatasan teknologi mengalami keterlambatan dalam menerima kebijakan. Selain itu, meskipun informasi mengenai angka kenaikan gaji dan dasar hukum sudah jelas, terdapat kebingungan di lapangan terkait prosedur implementasi, seperti pencairan dana tunjangan profesi.

Dalam meningkatkan efektivitas transmisi komunikasi, pemerintah disarankan untuk memperkuat infrastruktur komunikasi di daerah terpencil dan menggunakan teknologi alternatif, seperti SMS gateway atau aplikasi mobile, untuk memastikan kebijakan tersebar dengan baik. Pelatihan dan forum komunikasi lokal juga penting untuk memastikan pemahaman yang merata di seluruh wilayah. Penyediaan panduan teknis yang jelas serta peningkatan koordinasi antar sektor pemerintah dan organisasi profesi akan membantu mengatasi ketidakpastian yang ada, sehingga kebijakan dapat diterima dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan dan implementasinya dapat berjalan lancar.

Kejelasan Informasi

Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto, telah resmi mengumumkan kenaikan gaji untuk guru ASN dan non-ASN yang akan berlaku mulai tahun 2025. Dalam pengumuman yang disampaikan pada peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta pada 28 November 2024, dijelaskan bahwa guru ASN akan menerima tambahan satu kali gaji pokok, yang bervariasi tergantung pada golongan dan masa kerja mereka. Sebagai contoh, gaji pokok untuk golongan I berkisar antara Rp 1.685.700 hingga Rp 2.901.400, sementara untuk golongan IV bisa mencapai Rp 6.373.200.

Sementara itu, guru Non ASN atau honorer yang telah mengikuti sertifikasi akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar 2 juta per bulan. Kebijakan ini merupakan langkah signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang sering kali menghadapi tantangan finansial. Selain itu, anggaran untuk kesejahteraan guru juga mengalami peningkatan menjadi 81,6 triliun, meningkat sebesar 16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan kebijakan ini, diharapkan motivasi dan kesejahteraan guru akan meningkat, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengajaran dan pengembangan siswa. Kenaikan gaji ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi sektor pendidikan tetapi juga mendorong generasi muda untuk memilih profesi guru sebagai karier yang menjanjikan.

Konsistensi Informasi

Agar pesan yang disampaikan mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Pada kebijakan kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN, penting untuk memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan penerima, rincian kebijakan, serta dampak yang ditimbulkan. Ketidakkonsistenan dalam penyampaian informasi dapat mengakibatkan kebingungan di kalangan masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (Edwards, 1980).

Dalam pandangan Edwards, komunikasi kebijakan yang efektif membutuhkan keselarasan informasi di antara pihak-pihak terkait agar tidak terjadi kontradiksi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip komunikasi publik yang menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi pesan dalam membangun kepercayaan serta legitimasi kebijakan di masyarakat.

Kemajuan teknologi digital turut menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keselarasan informasi, terutama dengan cepatnya penyebaran berita melalui media sosial. Oleh sebab itu, strategi komunikasi pemerintah harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan akurat dan tetap konsisten di berbagai platform komunikasi. Dengan strategi semacam ini, masyarakat dapat memahami kebijakan secara lebih baik dan risiko miskomunikasi dapat diminimalkan (Rangkuti & Rangkuti, 2021).

Konsistensi dalam penyampaian informasi kebijakan publik tidak hanya menghindarkan masyarakat dari kebingungan tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam dunia yang semakin digital, pemerintah perlu memastikan bahwa strategi komunikasi mencakup semua saluran informasi dengan pendekatan yang terkoordinasi dan transparan. Dengan komunikasi yang terarah, masyarakat dapat lebih memahami kebijakan, merasa dilibatkan dalam prosesnya, dan mendukung implementasi kebijakan yang dilakukan.

Tantangan dan Peluang

Salah satu tantangan utama dalam komunikasi kebijakan publik terkait kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN pada tahun 2025 adalah penyebaran disinformasi yang dapat mengganggu pemahaman masyarakat. Dalam era informasi yang cepat seperti sekarang, berita palsu atau informasi yang tidak akurat dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial dan platform online lainnya, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan publik mengenai detail kebijakan, kriteria penerima, dan implikasi dari kenaikan gaji tersebut. Hal ini memerlukan upaya ekstra dari pemerintah untuk memastikan bahwa informasi yang benar dan jelas disampaikan kepada masyarakat.

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, yang sering kali mengakibatkan kurangnya legitimasi terhadap kebijakan yang diambil. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam diskusi mengenai kebijakan yang berdampak langsung pada mereka, seperti kenaikan gaji guru, hal ini dapat menimbulkan skeptisisme dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.

Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan ini. Berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan administrasi pendidikan perlu bekerja sama secara efektif agar informasi mengenai kenaikan gaji dapat disampaikan secara konsisten dan tepat waktu. Jika

koordinasi ini tidak terjalin dengan baik, maka akan ada risiko terjadinya kesalahan informasi atau bahkan penundaan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Di sisi lain, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan publik terkait kenaikan gaji guru. Salah satunya adalah pemanfaatan era digital yang memungkinkan pemerintah untuk menggunakan media sosial dan platform digital lainnya sebagai sarana komunikasi dua arah dengan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pemerintah dapat lebih mudah menjangkau audiens yang lebih luas dan menjawab pertanyaan serta kekhawatiran masyarakat secara langsung, sehingga meningkatkan keterlibatan publik dalam proses komunikasi.

Peluang lainnya adalah peningkatan transparansi dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan ini. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai alasan di balik kenaikan gaji serta manfaatnya bagi guru dan sistem pendidikan secara keseluruhan, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Transparansi ini akan membantu masyarakat merasa lebih terlibat dan memahami pentingnya kebijakan tersebut bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Terakhir, kebijakan kenaikan gaji guru juga membawa peluang untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada motivasi dan kualitas pendidikan. Dengan adanya insentif finansial yang lebih baik, diharapkan para guru akan lebih termotivasi untuk memberikan pengajaran yang berkualitas dan berkontribusi lebih banyak terhadap perkembangan siswa. Ini merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional serta menciptakan generasi penerus yang lebih berkualitas.

4. KESIMPULAN

Pendekatan komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan kenaikan gaji guru ASN dan Non-ASN tahun 2025 memainkan peran krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan pandangan George C. Edwards, penyampaian informasi yang efektif, kejelasan pesan, dan konsistensi dalam komunikasi menjadi aspek utama yang harus dikelola dengan cermat. Meski pemerintah telah memanfaatkan berbagai platform untuk menyampaikan informasi, masih ada tantangan seperti keterbatasan akses di daerah terpencil, penyebaran informasi yang salah, dan

kurangnya koordinasi antar lembaga yang perlu ditangani guna meningkatkan efektivitas komunikasi.

Di sisi lain, terdapat peluang besar melalui penggunaan teknologi digital, transparansi dalam penyampaian informasi, serta dampak positif terhadap kesejahteraan guru yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan memperkuat infrastruktur komunikasi, menjamin kejelasan dan keselarasan informasi, serta melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Dampaknya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Antaranews. (2025, January 24). *Besaran gaji guru ASN dan non-ASN 2025: Begini rinciannya*.
- CNN Indonesia. (2024, November 29). *Segini besaran gaji guru PNS dan honorer yang naik mulai 2025*.
- Djikzeul, D., & Moke, M. (2005). Public communication strategies of international humanitarian organizations. *International Review of the Red Cross*, 87(860), 674–691. <https://doi.org/10.1017/S1816383100184504>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy* (2nd ed.). Congressional Quarterly Press.
- Khoeriam. (2024, December 13). *Apakah gaji guru akan naik Rp 2 juta di tahun 2025?* Kompasiana.
- Lestari, A., An, S., Ichwan, M. S., Rumakat, L. Q. M., Saeni, A., & Nurjanah, S. (2024). *Komunikasi organisasi publik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Mani, L., Eng, A. S. E. A. N., & Latifah, P. (2020). *Budaya dan desain komunikasi kebijakan publik: Teori dan contoh kasus aplikasinya*.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). *Pengertian penelitian pendekatan kualitatif*. Dalam *Metode penelitian sosial* (hlm. 33).
- Maslamah, D. (2023). Pengembangan program Kamis Kreasi untuk meningkatkan kemampuan public speaking siswa. *Jurnal Pendidikan Taman Widya Humaniora*, 2(1), 23–46.
- Melintas.id. (2025, January 24). *Menyingkap fakta kenaikan gaji dan tunjangan guru: Klarifikasi penting bagi ASN dan non-ASN tahun 2025*.
- Mukarom, Z. (2020). *Teori-teori komunikasi*. Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Nalar Institute. (n.d.). *Pelatihan komunikasi kebijakan*. <https://nalarinstitute.com/pelatihan-komunikasi-kebijakan/>
- Nelson, P., Titsworth, S., & Pearson, J. (2009). *iSpeak: Public speaking for contemporary life* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Nurati, D. E. (n.d.). *Komunikasi kebijakan publik dalam pengelolaan pedagang kaki lima berbasis pada kearifan lokal*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang gaji Pegawai Negeri Sipil*.
- Persfe.com. (2024, December 1). *Kenaikan gaji guru: Solusi dari tantangan pendidikan yang belum usai*.
- Rangkuti, Z. A., & Rangkuti, M. R. (2021). Komunikasi kebijakan publik dalam implementasi program e-parking di Kota Medan. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(2), 141–151. <https://doi.org/10.14421/kjc.32.04.2021>
- Salmunndun9469. (2024, December 28). *Membangun kesejahteraan pendidik: Perspektif sosial terhadap kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN 2025*. Kompasiana.
- Serda, M., Becker, F. G., Cleary, M., et al. (2022). Strategi komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam kampanye nasional penurunan prevalensi stunting. *Interaksi Online*, 10(2), 152–169.
- Tempo.co. (2024, November 28). *Prabowo umumkan gaji guru resmi naik pada 2025*.
- Tunggala, S., & Sinta, D. D. (2024). Sistem informasi publik sebagai inovasi pelayanan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). *Societo Communication Journal*, 2(1), 37–57.
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2024, November 30). *Informasi terbaru: Rincian nominal gaji guru yang telah diumumkan Presiden RI*.
- Yulianti, C. (2024, December 14). *Soal kenaikan gaji, pakar minta perhatikan juga guru swasta dan jangan buat kecemburuan*. DetikEdu.